

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*.
- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia.
- Ananda S. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Andi Sofyan, & Hj. Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Guepedia.
- Eddy O.S. Hiarej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta Prenadamedia Group.
- Idik Saeful Bahri, 2020, *Kejahatan Cyber dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bina Aksara.

- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico.
- P.A.F Lamintang, & Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT Kharisma Putra Utama. Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2006. *KUHP & KUHP*. Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara baru.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers.
- Sughandi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional Surabaya.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Syarifin, & Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Rafika Adityama.

Komariah Emong Supardjadja, 2002, Ajaran melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, Alumni.

Adam Chazawi. 2011. Tindak pidana informasi & transaksi elektronik : penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi dan transaksi elektronik. Bayumedia

Eddy O.S. Hiariej. 2018. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cet. Ke 5. Cahaya Atma Pustaka.

Edmon Makarim. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bina Aksara.

Sitompul, J. (2012). Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Tatanusa.

Suseno, S. (2012). Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Refika Aditama.

Takdir Rahmadi. (2015). Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua. Rajawali Pers, .

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. (2001). Ketika kejahatan berdaulat : sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi . Jakarta : Peradaban.

JURNAL

Akbar, R., Meza, S., & Fikiri Alizar, A. 2019. *Perancangan Aplikasi Pembayaran Non Tunai untuk Pengelolaan Bisnis Pencucian Mobil*

dengan Memanfaatkan Teknologi QR Code (Studi Kasus : Oto Pro Car Wash & Detailing Padang) (Vol. 16).

Fandiyanto, R. 2019. Transformasi Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Bisnis Kreatif Berbasis Daring di Wilayah Eks-Keresidenan Besuki. www.startupranking.com

Mulyana, A., & Wijaya, H. 2018. Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, 7(2), 63–69.

Saputri, O. B. 2020. Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital. *J A*, 17(2), 2020–2237.

Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. 2020. Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287.

Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Rio Hendra, Syaifulllah, & Ferry Agus Sianipar. 2020. Perlindungan HAM Dalam Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI. 1, 155.

Rumlus, M. H. 2022. Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy Of Fraud In Electronic Transactions).

Sari, U. I. 2021. Kebijakan Penegakan Hukum Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan oleh Virtual Police di Indonesia. 2.

Widodo Arrys. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong.

Hamdiah, 2024, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan : Tinjauan Hukum*, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 18, No. 1

SKRIPSI

Marissa Ginting, 2019. "Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Efisiensi dalam Bertransaksi terhadap Penggunaan Ulang E-Money". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.

Misbahul Ma'ruf. M, 2021. Eksistensi Quick Response Indonesian Standard Code (QRIS) Dalam Pengembangan Financial Technology Pada Umkm di Kota Kendari (*Studi Kasus Warung Kopi Haji Anto*). IAIN Kendari.

A. Muh Yusran P Tanri. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara

Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/Pn Mks).
Universitas Hasanuddin.

Rainer Sendjaja. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli
Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum
Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/pbi/2016 Tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang
Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang
Elektronik

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tentang
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019

Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*
Untuk Pembayaran